

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Bastian (2001), kinerja adalah suatu gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan juga visi dalam organisasi. Kinerja adalah suatu prestasi yang telah dicapai oleh suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Kinerja dapat diketahui ketika seorang individu atau suatu kelompok tersebut memiliki suatu kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan. Kriteria keberhasilan berupa tujuan serta target yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan dan target, suatu kinerja dari seseorang dan suatu organisasi mungkin tidak bisa tercapai.

Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan dari organisasi, semua kegiatan organisasi yang harus bisa diukur. Pengukuran tersebut tidak hanya terhadap input (masukan), tetapi lebih ditekankan pada keluaran, atau manfaat dari program tersebut.

Menurut Larry Stout (1993) dalam Bastian (2001) *performance Measurement Guide* mengatakan jika pengukuran atau penilaian dari kinerja merupakan suatu proses untuk mencatat dan mengukur pencapaian suatu misi dari hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut PP No. 8 tahun 2006 dalam Khikmah (2014), kinerja merupakan suatu keluaran ataupun hasil dari adanya kegiatan dan program yang akan atau sudah tercapai berhubungan yang dengan penggunaan suatu anggaran yang diikuti dari kualitas serta kuantitas yang sudah diukur. Kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dari tanggung jawab serta wewenangnya dalam upaya mencapai tujuan legal yang sesuai pada etika serta moral.

### **2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah suatu proses dari penilaian atas kemajuan dari pekerjaan pada sasaran dan juga tujuan yang sudah ditargetkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan suatu barang maupun jasa, suatu kualitas barang maupun jasa (yaitu meliputi seberapa baik barang dan jasa tersebut diserahkan dan juga sampai seberapa jauh pelanggan tersebut terpuaskan), hasil dari kegiatan yang dibandingkan dari maksud yang diinginkan, serta efektivitas suatu tindakan pada saat mencapai suatu tujuan (Robertson, 2002) dalam (Mahsun, 2012).

Menurut Mardiasmo (2002), suatu sistem pengukuran kinerja pada sektor publik bertujuan membantu manajer publik untuk dapat menilai adanya pencapaian sebuah strategi dengan menggunakan alat ukur baik finansial maupun non finansial. Suatu sistem dari pengukuran kinerja juga digunakan untuk alat pengendalian suatu organisasi, karena suatu pengukuran kinerja diperkuat dengan menggunakan *reward* dan juga *punishment system* .

Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu penilaian kinerja, yakni digunakan untuk menilai suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan itu berjalan sukses ataupun tidak.

Pengukuran kinerja juga sangat penting untuk digunakan dalam menilai suatu akuntabilitas dari organisasi manajer saat menghasilkan suatu pelayanan publik yang lebih baik lagi. Akuntabilitas tidak hanya sekedar kemampuan untuk memperlihatkan bagaimana cara uang publik dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan memperlihatkan jika uang publik tersebut sudah dibelanjakan dengan sesuai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sistem pengukuran kinerja yang baik menunjukkan faktor kunci dari suksesnya suatu organisasi (Ulum, 2012).

Keberhasilan suatu organisasi pada sektor publik bukan diukur hanya dari perspektif keuangan saja. Surplus maupun defisit didalam laporan keuangan tidak bisa menjadi tolak ukur suatu keberhasilan. Karena pada dasarnya fokusnya yang bukan pada pencapaian profit, keberhasilan suatu organisasi pada sektor publik juga harus diukur melihat dari kinerja yang dihasilkannya. Hal ini juga sesuai dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran dibuat tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga berdasarkan pada target kinerja kualitatif. Karena itu aspek pertanggung jawabannya tentu tidak cukup hanya berupa laporan keuangan, tetapi dilengkapi dengan laporan kinerja.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang sistematis yang digunakan untuk menilai apakah suatu program ataupun kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan target atau belum, dan yang tidak kalah penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran

kinerja dimulai dari suatu proses pada penetapan indikator kinerja dengan memberikan informasi yang memungkinkan suatu unit kerja pada sektor publik dalam memonitor kinerjanya untuk menghasilkan *outcome* dan juga *output* kepada masyarakat. Pengukuran kinerja diharapkan mampu dalam membantu setiap pengambil keputusan pada saat memonitor dan memperbaiki sebuah kinerja serta berfokus dalam tujuan suatu organisasi sebagai rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja pada bidang keuangan daerah yaitu pada penerimaan serta belanja daerah dengan memakai sistem keuangan yang telah ditentukan dari kebijakan dan ketentuan undang-undang dalam satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran suatu kinerja tersebut adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sebuah sistem sebuah laporan pertanggungjawaban daerah yang berupa perhitungan APBD.

### **2.1.3 Tujuan sistem Pengukuran Kinerja**

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2007) dalam Nordiawan dan Hertianti (2010) adalah:

- a. Mengetahui tingkat kesuksesan tujuan organisasi

Pengukuran kinerja dalam organisasi pada sektor publik dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana ketercapaian suatu tujuan dalam organisasi. Penilaian kinerja digunakan sebagai alat ukur yang mampu menghasilkan tingkat ketercapaian tujuan dan dapat menunjukkan apakah

organisasi yang dijalankan tersebut sudah berjalan sesuai arah ataukah malah menyimpang dari awal tujuan yang ditetapkan.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja dijadikan sebagai landasan dalam membenahi suatu hasil dari sebuah usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

c. Meningkatkan kinerja pada periode-periode yang akan datang

Pengukuran kinerja bermanfaat sebagai landasan untuk pembelajaran perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

d. Memberikan pertimbangan yang sesuai sistem dalam pembuatan suatu keputusan untuk pemberian suatu penghargaan (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*)

Pengukuran kinerja memiliki tujuan sebagai dasar bagi manajer untuk dapat memberikan suatu *reward* (misalnya: kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi) atau *punishment* (misalnya: pemutusan hubungan kerja, penundaan promosi, dan teguran).

e. Memberikan motivasi kepada pegawai

Pengukuran kinerja dimaksudkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan motivasi para pegawai. Dengan memberikan kompensasi dan *reward* untuk setiap pegawai yang memiliki prestasi.

f. Menciptakan suatu akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kinerja manajerial yang dihasilkan, seberapa bagus kinerja finansial yang dicapai dalam organisasi, serta kinerja lainnya yang dijadikan dasar sebagai penilaian akuntabilitas.

#### **2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja**

Manfaat dari pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah menurut (Ulum, 2012) :

1. Memberi suatu pemahaman tentang ukuran yang dijadikan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah agar dapat mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan.
3. memantau dan memberi pengarahan tentang bagaimana pencapaian kinerja serta membandingkannya dengan suatu target kinerja yang telah ditentukan dan juga melakukan tindakan korektif dalam memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan sebuah penghargaan serta hukuman yang sesuai dengan pencapaian prestasi yang ditetapkan sesuai pada sistem pengukuran kinerja yang sudah disepakati.
5. Sebagai suatu komunikasi antara bawahan dan pimpinan untuk memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah keputusan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami suatu proses kegiatan pada instansi pemerintah.
8. Memastikan jika pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan objektif.

### 2.1.5 Value For Money

*Value for money* menurut Halim dan Kusufi (2014), merupakan konsep yang dijadikan dalam pengukuran ekonomi, efektivitas, dan efisiensi suatu kinerja program, kegiatan dan organisasi. *Value for money (vfm)* merupakan bagian penting dari suatu organisasi pada sektor publik dan sering juga disebut dengan inti atau pokok dari pengukuran kinerja dalam sektor publik.

Untuk menerapkan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja diperlukan adanya pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja dibesarkan dengan menggunakan variabel kunci yang telah diidentifikasi oleh suatu organisasi pada unit kerja yang terkait untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian kerjanya. Indikator kerja tersebut lalu dibandingkan pada target kinerja dan standar kinerja.

Dalam pengembangan indikator kinerja hendaknya harus seimbang, yaitu tidak hanya mengembangkan indikator kinerja keuangan saja, tetapi juga mengembangkan indikator kinerja non keuangan. Indikator keuangan hanya berfokus pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Sementara pada indikator non keuangan lebih berfokus kepada outcome, yaitu meliputi kepuasan pelanggan, suatu kualitas layanan, dan cakupan sebuah layanan. Pengukuran kinerja dalam *value for money* bisa menciptakan suatu keseimbangan antara sebuah pengukuran hasil dan juga sebuah pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *value for money* berfokus pada hasil serta lebih bersifat kualitatif, akan tetapi pada indikator ekonomi dan efisiensi lebih berfokus pada proses dan lebih bersifat kuantitatif (Halim dan Kusufi, 2014).

### **2.1.6 Pengukuran *Value For Money***

*Value for money* adalah nilai pokok yang digunakan dalam pengukuran kinerja dalam sebuah organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari sebuah *output* yang didapatkan, tetapi juga mempertimbangkan sebuah *input*, *output*, serta *outcome* secara bersama-sama. Sebuah permasalahan yang ada adalah sulitnya mengukur suatu output karena terkadang output yang dihasilkan oleh pemerintah tidak tentu berupa output yang berwujud (*tangible output*), akan tetapi juga memiliki sifat yang tidak berwujud (*intangible output*) (Mardiasmo, 2002).

Kriteria pokok yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen publik sekarang ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang diharapkan oleh masyarakat meliputi pertanggungjawaban atas proses *value for money*, yang meliputi ekonomi (hemat cermat) dalam sebuah pengadaan serta alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam menggunakan sumber daya, dalam arti diminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasilnya, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian suatu tujuan dan juga sasaran (Mardiasmo, 2002).

Dalam penilaian kerja yang objektif dibutuhkan adanya indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas yang terkait dengan kesesuaian maksud dan tujuan, konsistensi, dan kepuasan publik. Indikator kinerja berperan sebagai penyedia informasi untuk pertimbangan pembuatan keputusan. Indikator kinerja juga bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pihak eksternal maupun internal.



Pihak internal menggunakannya untuk dapat menaikkan sebuah kuantitas serta kualitas pelayanan dan juga efisiensi biaya. Pihak eksternal menggunakannya sebagai kontrol dan informasi untuk mengukur suatu tingkat akuntabilitas publik suatu organisasi.

Pembuatan serta penggunaan sebuah indikator kinerja membantu setiap pelaku pada setiap proses pengeluaran. Indikator kinerja digunakan oleh manajer publik untuk melihat suatu pencapaian program dan juga mengidentifikasi suatu masalah yang penting. Selain itu, sebuah indikator kinerja juga diharapkan dapat membantu pemerintah pada proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran (Ulum, 2012).

Tiga pokok bahasan *Value For Money* menurut (Ulum, 2012) :

1. Ekonomi

Ekonomi adalah bagian antara pasar dan juga masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi merupakan proses pembelian barang maupun jasa input dengan kualitas tertentu dengan menggunakan harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Ekonomi (hemat/tepat guna) juga disebut suatu kehematan dalam mencakup pengelolaan dengan teliti dan tanpa adanya pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dinilai ekonomis apabila bisa menghilangkan dan menekan seluruh biaya yang tidak diperlukan (Ulum, 2012).

Menurut Mahmudi (2007) dalam Halim dan Kusufi (2014) mengartikan ekonomi merupakan suatu perbandingan antara sebuah input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dan sebuah input primer (kas). Pada lingkup organisasi pemerintahan, sebuah ukuran ekonomi berwujud anggaran yang

digunakan untuk membiayai adanya aktivitas tertentu. Apabila sebuah sumber daya yang dihasilkan berada dibawah anggaran maka dapat disebut penghematan, akan tetapi sebaliknya apabila diatas anggaran maka disebut pemborosan.

## 2. Efisiensi

Efisiensi adalah sebuah hal yang pokok dari ketiga bahasan *value for money*. Efisiensi digunakan untuk menghitung seberapa baik kinerja suatu organisasi dalam memanfaatkan setiap sumber daya yang dimilikinya dalam menghasilkan suatu output (Mahmudi, 2007) dalam (Halim dan Kusufi, 2014).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), efisiensi merupakan hubungan antara barang dan juga jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan/aktivitas dengan menggunakan sumberdaya (*input*) yang digunakan.

Menurut Mardiasmo (2002) efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil ouput yang dihasilkan terhadap input yang telah digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika sebuah produk dan hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan juga dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Indikator efisiensi merupakan hubungan antara sebuah masukan sumber daya pada suatu unit organisasi (misalnya: upah, staff, dan biaya administratif) serta keluaran yang dihasilkan.

## 3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan sukses atau tidaknya dari pencapaian suatu kegiatan atau kebijakan dimana ukuran sebuah efektivitas adalah merupakan

output. Efektivitas berkaitan dengan output yang ditargetkan dari hasil yang ingin dicapai. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan. Semakin besar suatu output yang dihasilkan dalam mencapai sebuah tujuan, semakin efektif pula suatu organisasi, program, serta kegiatan tersebut. Jika ekonomi fokusnya adalah pada input maka efisiensi fokusnya adalah pada output atau proses, jadi efektivitas fokusnya adalah pada *outcome* (hasil) (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Menurut Mardiasmo (2002), pada dasarnya efektivitas merupakan hubungan antara sebuah pencapaian tujuan dan target yang ingin dicapai. Efektivitas adalah hubungan antara sebuah keluaran dengan sebuah tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif ketika proses sebuah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan (*spending wisely*).

Indikator efektivitas yaitu memperlihatkan antara sebuah akibat dan dampak (*outcome*) dari sebuah keluaran (*output*) suatu program dalam mencapai sebuah tujuan program. Suatu pelayanan meskipun telah dilakukan secara efisien, belum tentu efektif jika pelayanan tersebut tidak bisa menambah nilai untuk pelanggan. Oleh karena itu indikator efisien dan juga efektivitas harus dilakukan secara bersama-sama.

### 2.1.7 Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

Langkah-langkah pengukuran *value for money* menurut (Mardiasmo, 2002):

#### 1) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran suatu ekonomi hanya melihat masukan yang digunakan. Ekonomi terkait sebaik mana suatu organisasi sektor publik mampu menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan serta tidak produktif. Suatu kinerja dikatakan ekonomis ketika sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran.

#### 2) Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dihitung dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Dalam hal ini output adalah realisasi pengeluaran dan input adalah realisasi pendapatan. Semakin tinggi suatu output yang dihasilkan daripada input, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi suatu organisasi.

#### 3) Pengukuran Efektifitas

Efektifitas merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi pada saat proses pencapaian suatu tujuan yang diharapkan. Sebuah organisasi bisa dikatakan telah berjalan efektif ketika berhasil dalam melakukan suatu pencapaian tujuan. Dalam efektifitas tidak melihat berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, akan tetapi efektifitas pada hasil yang dihasilkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* telah dilakukan oleh banyak peneliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan apakah sudah sesuai dengan konsep *value for money* yaitu: ekonomi, efektivitas dan efisien atau belum. Adapun beberapa penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan *Value for money* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Sample	Alat analisis	Hasil
1.	Penilaian Kinerja yang Berbasis <i>value for money</i> atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.  (Agus Purnomo Adi Putra & Ni Gusti Putu Wirawati, 2015)	Data diambil dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan berupa data PAD Kabupaten Tabanan, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan.	Teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.	Berdasarkan penilaian <i>value for money</i> untuk penerimaan PAD dapat dikatakan baik, karena sudah memenuhi kriteria <i>value for money</i> yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
2.	Analisis Pengukuran kinerja pemerintah Daerah dengan menggunakan Prinsip <i>value for money</i> tahun 2010-2013 (studi kasus Kabupaten Sumenep).  (Nindy Cahya Feriska	Data yang digunakan laporan perhitungan APBD dari DPPKAD dan website Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.	Teknik analisis data kualitatif	Hasil analisis penelitian Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Sumenep periode 2010-2013 berada pada kategori ekonomis. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami

No	Referensi	Sample	Alat analisis	Hasil
	Sari,2014)			peningkatan sehingga berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektivitas juga mengalami peningkatan sehingga berada pada kategori efektif.
3.	<p>“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Konsep value for money”.</p> <p>(Harry Saputro Liando, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim,2014).</p>	Data dari Badan Pusat Statistik (2013:5) Laporan realisasi APBD sumber dari DPPKAD.	Metode Deskriptif Kuantitatif .	Hasil analisis dari segi ekonomis komponen belanja modal masih didominasi oleh belanja pegawai, dari segi efisiensi kinerja anggaran sudah baik karena nilai output lebih besar dari nilai input yang digunakan, dan dari segi efektifitas pengguna anggaran dan alokasi anggaran ditahun 2012 lebih kecil dibandingkan tahun 2013, artinya pengelolaan anggaran tahun 2012 lebih efektif daripada tahun 2013.
4.	“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dari data DPPKAD laporan Realisasi APBD tahun 2013.	Metode Deskriptif Kuantitatif	Secara umum realisasi kinerja pendapatan pemerintah kota Bitung tahun

No	Referensi	Sample	Alat analisis	Hasil
	Pemerintahan Kota Bitung”.  (Ardon Fridolin Honga & Ventje Ila, 2014)			2013 dapat dikatakan baik, karena pemerintah dapat mengendalikan belanja daerah dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan tidak mengurangi tujuan dan sasaran dari program yang direncanakan.
5.	Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.  (Tri Siwi Nugrahani, 2005)	Data dari Biro Pusat Statistik Pemda DIY tentang APBD dan realisasi APBD periode 2001-2004 sampel periode 4 tahun.	Metode analisis kualitatif dan kuantitatif	Hasil analisis kinerja keuangan pada Pemda DIY cukup ekonomis dan efisien tetapi kurang efektif, karena berdasarkan naik turunnya kinerja pemda DIY dengan konsep VFM, menunjukkan kinerja finansial mengalami penurunan.

Sumber : Putra dan Wirawati (2015); Sari (2014); Liando dkk (2014); Honga dan Ila (2014); Nugrahani (2005)

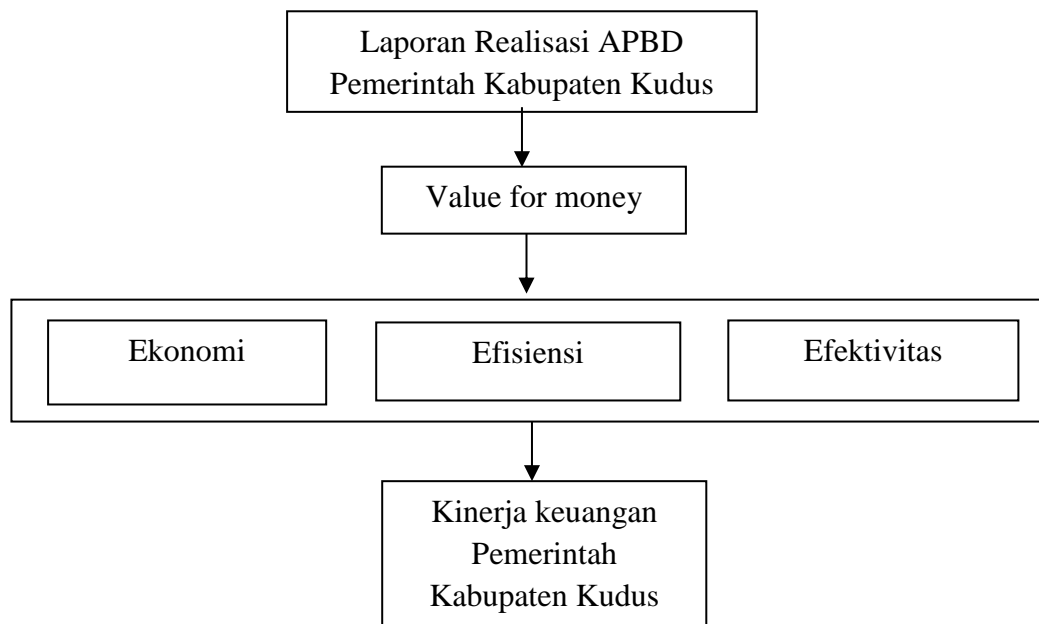
### 2.3 Kerangka pemikiran Teoritis

*Value for money* adalah sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu bagian dari *input*, *output*, dan *outcome*. Kegagalan suatu organisasi sektor publik dalam memperoleh sebuah input dengan harga yang semestinya menjadikan tidak terpenuhinya suatu indikator ekonomi. Input yang

tidak sesuai juga akan mengakibatkan inefisiensi yang akan mengarah pada ketidakefektifan pencapaian program kinerja secara keseluruhan (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja yang bertujuan dalam membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi. Suatu pengukuran kinerja pada sebuah organisasi sektor publik bukan hanya didasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial, karena tujuan utama organisasi ini bukan hanya memperoleh laba tetapi bertujuan untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dalam masyarakat (Ulum, 2012).

*Value for money* adalah konsep sebuah pengelolaan suatu organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga konsep utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Berikut adalah kerangka pemikiran teoritis :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa Laporan APBD diukur menggunakan konsep *value for money* yang dilakukan dengan melalui tiga tahap analisis, yaitu 1) ekonomi, membandingkan anggaran/target pengeluaran dengan realisasi pengeluaran; 2) efisiensi, membandingkan output dengan input (realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan); dan 3) efektifitas, membandingkan realisasi pendapatan dengan realisasi anggaran, kemudian ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kudus merupakan suatu tingkat pencapaian dari sebuah hasil kerja pada bidang keuangan daerah yaitu meliputi penerimaan dan belanja daerah.